

## RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pengelolaan kearsipan. Kemampuan suatu institusi dalam beradaptasi dengan pengelolaan arsip elektronik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 melaksanakan penerapan kebijakan digitalisasi arsip sesuai dengan PP Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh guna mencapai birokrasi pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Namun pada pengimplementasiannya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman komunikasi antar pegawai. Kurangnya sumber daya manusia dari segi kemampuan dan beberapa fasilitas pendukung, kurangnya adaptasi terhadap perubahan dan lain-lain. Penerapan kebijakan digitalisasi arsip oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh guna mencapai birokrasi pelayanan publik yang berkinerja tinggi guna memperlancar seluruh proses pendataan secara terpadu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berfokus pada pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini kemudian diolah menjadi deskripsi yang sistematis dan terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari obyek penelitian yang diperoleh di lapangan. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung menggunakan berbagai sumber yang sudah ada, ataupun penelitian lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi arsip dengan memperhatikan empat faktor dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan model George C. Edwards III dengan mempertimbangkan empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan digitalisasi arsip oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 sudah tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Arsip, Implementasi Kebijakan, PP No. 95 Tahun 2018, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5, Kualitatif

## SUMMARY

*The rapid development of information and communication technology in the digital era has a very significant impact on archival management. The ability of an institution to adapt to electronic archive management is very important to meet information needs. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operating Region 5 implements the implementation of the archive digitization policy in accordance with PP Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE) to realize an integrated and comprehensive electronic-based government system in order to achieve a high-performing public service bureaucracy. However, in its implementation, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operating Region 5 has several obstacles to face, namely the lack of understanding of communication between employees. Lack of human resources in terms of ability and some supporting facilities, lack of adaptation to change and others. The implementation of the archive digitization policy by PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operating Region 5 is expected to realize an integrated and comprehensive electronic-based government system in order to achieve a high-performing public service bureaucracy to facilitate the entire data collection process in an integrated manner.*

*This study uses a descriptive qualitative method and focuses on data collection through observation, interviews, and document analysis. The results of this study are then processed into a systematic and structured description to provide a clear picture of the phenomenon being studied. The data obtained comes from primary data and secondary data. Primary data is collected directly by researchers from research objects obtained in the field. Secondary data is obtained or collected indirectly using various existing sources, or other research that can be legally accounted for.*

*The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the archive digitization policy by paying attention to four factors in policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure at PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operating Region 5. The theory used is the theory of policy implementation model of George C. Edwards III model by considering four critical factors or variables in implementing public policies, namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The results showed that the implementation of the archive digitization policy by PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operating Region 5 has been achieved in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** *Archive Digitization, Policy Implementation, PP Number 95 of 2018, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Operating Region 5, Qualitative*